



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG MAHUMU KECAMATAN TAMAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Mahumu Kecamatan Tamako;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG MAHUMU KECAMATAN TAMAKO.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Mahumu terdiri dari:
 - a. sebagian dari pulau Mahumu;
 - b. pulau Mahangsumangi;
 - c. pulau Batumananinta; dan
 - d. pulau Batubahoa.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan:
 - a. Kampung Mahumu I pada sebagian area sebelah selatan; dan
 - b. Kampung Mahumu II pada sebagian area sebelah selatan.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada area sebelah utara, sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.
- (4) Pulau Mahangsumangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 24' 41.92''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit empat puluh satu koma sembilan puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 22.64''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma enam puluh empat detik bujur timur).
- (5) Pulau Batumananinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada koordinat $03^{\circ} 24' 35.67''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit tiga puluh lima koma enam puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 33.55''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma lima puluh lima detik bujur timur). 


- (6) Pulau Batubahoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak pada koordinat $03^{\circ} 24' 36.89''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit tiga puluh enam koma delapan puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 36.20''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam koma dua puluh detik bujur timur).

BAB III

SEGMENT BATAS

Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Mahumu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.12.2013-12.2018-12.2019-000 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 14.180''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit empat belas koma seratus delapan puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 0.094''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit nol koma sembilan puluh empat detik bujur timur) pada suatu tempat bernama bowong hesang yang merupakan titik simpul 3 (tiga) Kampung;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara barat laut melewati perkebunan sampai pada TK71.03.12.2013-12.2018-001 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 28.987''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit dua puluh delapan koma sembilan ratus delapan puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 39.805''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh sembilan koma delapan ratus lima detik bujur timur) di suatu tempat bernama kaleta; dan

- c. selanjutnya mengarah ke barat melewati perkebunan dan juga pekarangan rumah sampai pada TK71.03.12.2013-12.2018-002 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 29.144''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit dua puluh sembilan koma seratus empat puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 53.363''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma tiga ratus enam puluh tiga detik bujur timur) di suatu tempat bernama apeng meha.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Mahumu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.12.2013-12.2018-12.2019-000 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 14.180''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit empat belas koma seratus delapan puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 0.094''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit nol koma sembilan puluh empat detik bujur timur) pada suatu tempat bernama bowong hesang yang merupakan titik simpul 3 (tiga) Kampung; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut melewati perkebunan, pekarangan rumah penduduk sampai pada TK71.03.12.2013-12.2019-001 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 23.632''$ LU (tiga derajat dua puluh empat menit dua puluh tiga koma enam ratus tiga puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 25.930''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma sembilan ratus tiga puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama malewehe yang merupakan kawasan mangrove. 

BAB IV
PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Mahumu menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Mahumu adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Mahumu adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun dua ribu dua puluh dua.
- (4) Peta Batas Kampung Mahumu wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Mahumu;
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Mahumu; dan
 - c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Mahumu.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Mahumu yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*. *fa*

- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Mahumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Mahumu melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat. *fa*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

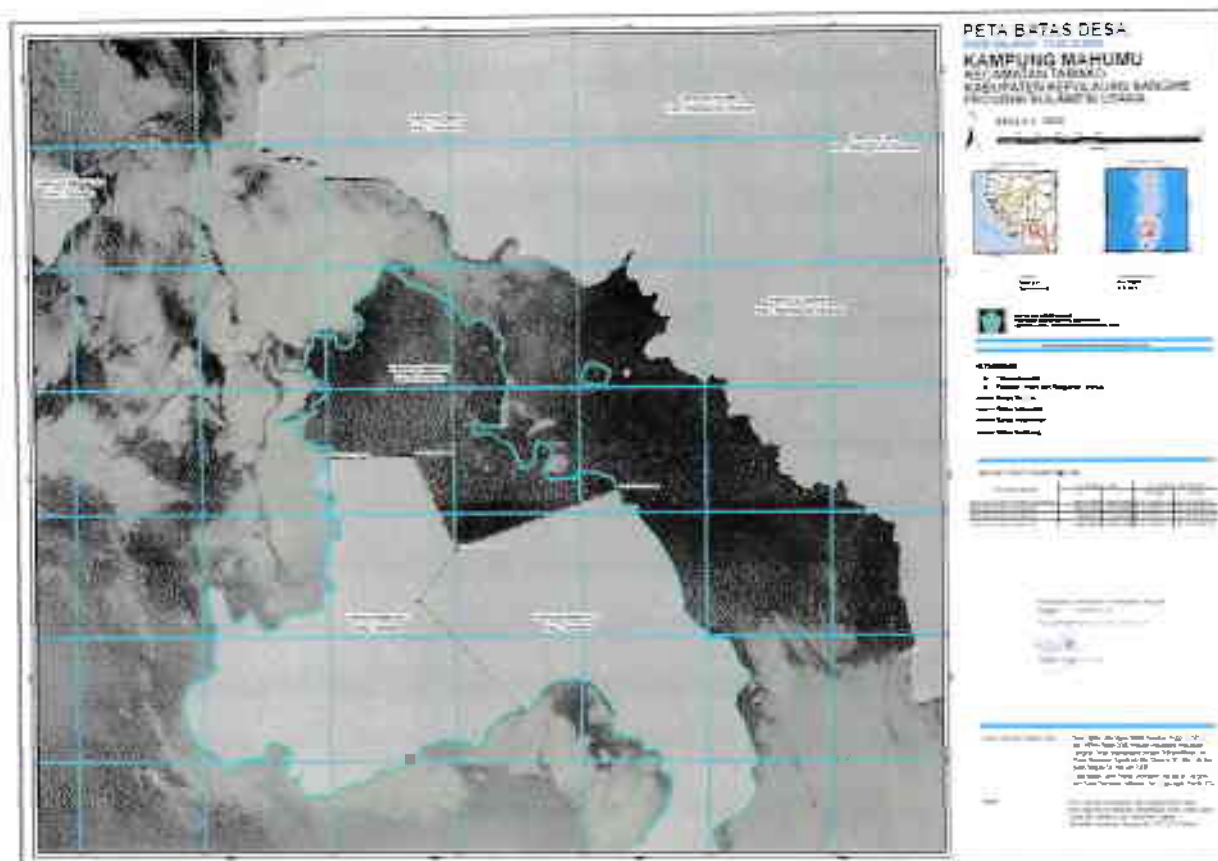
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG MAHUMU
KECAMATAN TAMAKO

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG MAHUMU



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE